

Dampak Penerapan *Good Governance*, Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah

Rosen Heluka¹, Victor Pattiasina², Entar Sutisman³,
Melyanus Bonsapia⁴, Andarias Patiran⁵

¹⁻³ Universitas Yapis Papua

⁴⁻⁵ Universitas Ottow Geissler Papua

victorpattiasina6@gmail.com

Abstract:

This study examines the effect of implementing good governance, accounting information systems, and internal control systems on the performance of Yahokimo district government agencies. testing was carried out on a sample of 97 respondents. The sample method used is purposive sampling. data collection is done by direct survey. Hypothesis testing was tested empirically using mutiple linier regression.

The results showed that the implementation of Good Governance had a significant positive effect on the Performance of the Yahokimo Regency Government Agencies, the Accounting Information System had a significant positive effect on the Performance of the Yahokimo Regency Government Agencies, the Internal Control System had a significant positive effect on the Performance of the Yahokimo Regency Government Agencies and the influence of the Implementation of Good Governance, Information Systems Accounting and Internal Control Systems simultaneously affect the Performance of Government Agencies of Yahokimo Regency.

Keywords; *Good Governance, Accounting Information Systems, Internal Control Systems, Performance of Government Agencies.*

Abstrak:

Penelitian ini menguji pengaruh penerapan good governance, sistem informasi akuntansi, dan sistem pengendalian internal terhadap kinerja instansi pemerintah kabupaten Yahokimo. pengujian dilakukan terhadap sampel sebanyak 97 responden. Metode sampel yang digunakan adalah purposive sampling. pengumpulan data dilakukan dengan survei langsung. Pengujian hipotesis diuji secara empiris menggunakan analisis regresi linear berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *good governance* berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Yahokimo, sistem informasi akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Yahokimo dan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan. berpengaruh positif terhadap kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Yahokimo serta pengaruh penerapan *good governance*, sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian intern secara simultan berpengaruh terhadap kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Yahokimo.

Kata Kunci; *Good Governance, Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern, Kinerja Instansi Pemerintah.*

Pendahuluan

Akuntansi sektor publik saat ini khususnya di Indonesia semakin berkembang pesat seiring dengan adanya era baru dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Akuntansi sektor publik dapat menuntut sektor publik untuk bertanggungjawab terhadap kepentingan publik. Sektor publik merupakan penyedia layanan terhadap kepentingan masyarakat yang paling utama di Indonesia dan juga merupakan sarana bagi undang-undang untuk melaksanakan kebijakan sosial.

Keterapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No XV tentang penyelenggaraan otonomi daerah seperti pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan dan perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan landasan hukum bagi dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun (1999) Tentang Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah No 7 Tahun (1999) menyatakan bahwa otonomi daerah adalah wewenang yang dimiliki oleh daerah untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya menurut kehendak sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang tersebut diganti dan disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No 32 (2004) dan Peraturan Pemerintah No 33 Tahun (2004) Tentang Pemerintah Daerah. kedua regulasi tersebut telah merubah akuntabilitas atau pertanggung jawaban pemerintah dari pertanggungjawaban vertikal (pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat) menjadi pertanggungjawaban horizontal (pertanggungjawaban kepada masyarakat melalui dewan perwakilan rakyat). Hal tersebut membuat pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan dituntut harus bisa mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat (Tamaela, Pattiasina, Dasinapa, Marani, 2020).

Instansi pemerintah merupakan suatu organisasi yang terdiri sekumpulan orang-orang yang dipilih berdasarkan prosedur, yang sudah ditentukan guna melaksanakan tugas dan mewujudkan pelayanan publik yang baik (Surijadi & Tamaela, 2018). Setiap instansi pemerintah memiliki tujuan yang ingin dicapai dengan memanfaatkan kualitas, kualitas yang dimaksud yaitu adalah dari segi peningkatan sumber daya manusia secara efektif dan efisien guna meningkatkan kualitas pelayanan publik (Nahuway & Tamaela, 2020).

Pengukuran akan kinerja pemerintah sangat penting, karena dengan terukurnya kinerja akan menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sehingga pembangunan disuatu daerah tepat sasaran. Wulandari, (2011) menyatakan bahwa kinerja merupakan suatu prestasi yang sudah dicapai oleh karyawan dalam merealisasikan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Keberhasilan kinerja pemerintah bisa diukur dengan laporan keuangan yang dilaporkan dan opini audit yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Pemerintah Daerah dan pelayanan pada kepentingan masyarakat. Kinerja Pemerintah Daerah juga bisa diukur dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Wulandari, (2011) yaitu pencapaian target kinerja aktivitas pada suatu program, ketetapan dan kesesuaian hasil, tingkat pencapaian program, dampak hasil aktivitas pada kehidupan masyarakat, kesesuaian realisasi anggaran dengan anggaran, pencapaian efisiensi operasional dan perilaku pegawai.

Pemerintah Daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan roda pemerintahan (pembangunan dan layanan sosial masyarakat) wajib memberikan pertanggungjawaban kinerja daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik Ruspina, (2013). Diterapkannya Peraturan Pemerintah No 60 Tahun (2008) Tentang Pemerintah Daerah mengisyaratkan Pemerintah Daerah yang otonom diharapkan mendapat opini wajar Tanpa pengecualian (WTP) meskipun kenyataannya untuk mendapat opini WTP itu sangat sulit. Fenomena kinerja di pemerintah daerah, salah satunya Kabupaten Yahukimo provinsi papua. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo dan Mappi Tahun 2021 dapat diperiksa dan kami serahkan kepada DPRD Kabupaten Yahukimo dan Mappi dan kepada Bupati Yahukimo serta Bupati Mappi yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Mappi. Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Yahukimo dan Mappi Tahun 2019 dengan memperhatikan kesesuaian Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern. LHP atas LKPD Tahun 2021 terdiri dari tiga laporan utama yaitu LHP atas LKPD Tahun 2021, LHP atas Sistem



Pengendalian Intern (SPI), dan LHP atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK, dapat disimpulkan bahwa penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Mappi Tahun 2021 telah sesuai dengan SAP berbasis akrual, telah diungkapkan secara memadai. Selain itu, perlu dijelaskan bahwa opini yang diberikan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah tersebut adalah merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam masing-masing LKPD. Untuk itu BPK RI memberikan opini “Wajar Tanpa Pengecualian” atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo untuk yang pertama kalinya. Sedangkan untuk Kabupaten Mappi BPK RI memberikan opini “Wajar Dengan Pengecualian” yang pertama kalinya atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerahnya. Dengan diserahkan LHP ini, DPRD sesuai dengan kewenangannya dan para pejabat yang terkait wajib menindaklanjutinya, selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP ini diterima. BPK RI berharap agar Bupati Yahukimo dan Bupati Mappi beserta jajarannya melakukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk mengeliminasi kelemahan-kelemahan yang ada, sehingga penyajian laporan keuangan dimasa mendatang semakin baik. <https://papua.bpk.go.id/>

Adapun Faktor yang mempengaruhi Kinerja Instansi Pemerintah Daerah yang pertama adalah tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Menurut Suprayogi, (2010) Pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien adalah salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini didukung dari penelitian Noch et al., (2021) hasil penelitian menunjukkan *good governance* berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintahan. Hasil penelitian diatas bertolak belakang dengan hasil penelitian Hidayat et al., (2021) hasil penelitian yang membuktikan bahwa *good governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pegawai pemerintahan.

Selanjutnya faktor kedua yang mempengaruhi kinerja instansi pemerintahan adalah sistem informasi akuntansi. Menurut Krismiaji, (2010) sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan dan mengoperasikan bisnis. Pernyataan diatas sejalan dengan yang hasil kajian Harahap, (2021) hasil penelitian menunjukkan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintahan.

Faktor terakhir yang mempengaruhi kinerja instansi pemerintahan adalah sistem pengendalian internal. Menurut Arens et al., (2012) sistem pengendalian internal yang memiliki tujuan organisasi melalui aktivitas yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap Peraturan Pemerintah No 60 Tahun (2008) Tentang Sistem Pengendalian Internal. Pernyataan diatas dapat didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Mattoasi et al., (2021) hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja instansi pemerintahan. Hasil penelitian diatas bertolak belakang dengan hasil penelitian Hidayat et al., (2021) hasil penelitian membuktikan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintahan.

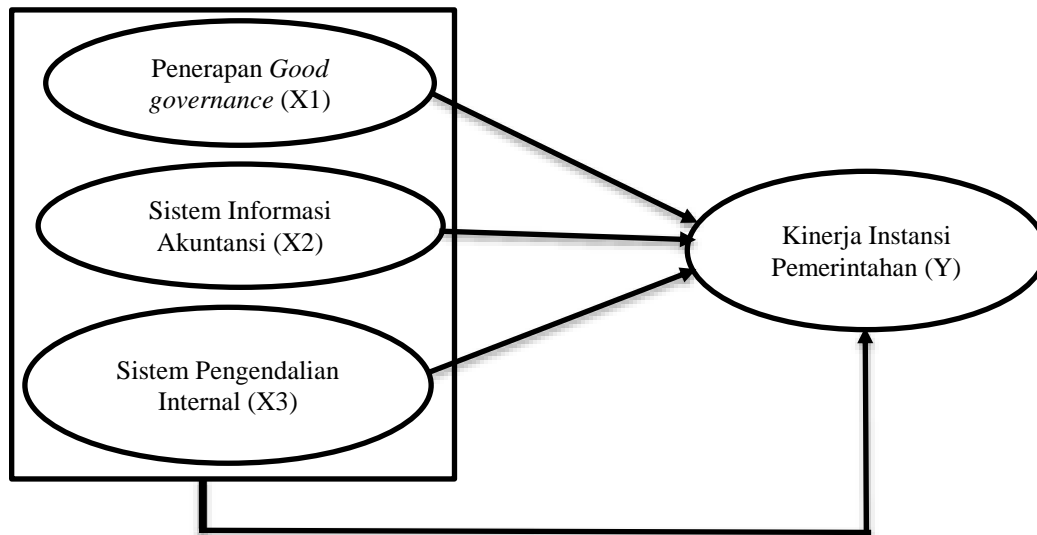
Berdasarkan pemaparan konsep dan realita yang terjadi dan hasil kajian – kajian empiris diatas ternyata menunjukkan adanya ambivalensi hasil penelitian artinya ambivalensi atau kontradiksi hasil penelitian tersebut sebenarnya adalah *research gap* (kesenjangan penelitian). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh penerapan *good governance*, sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian internal terhadap kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua.

Kerangka Teoritis

Menurut (Sugiyono, 2017) menyatakan bahwa kerangka konseptual akan menghubungkan secara teoritis antara variabel - variabel penelitian yaitu antara variabel

independent dengan variabel dependent. Berdasarkan hubungan antara variabel dalam penelitian ini yaitu variabel dependent (*Dependent Variabel*) adalah kinerja instansi pemerintahan (Y). sementara untuk variabel independent (*Independent Variabel*) adalah penerapan *good governance* (x1), sistem informasi akuntansi (x2) dan sistem pengendalian internal (X3). Sehubungan dengan pembahasan tentang variabel-variabel diatas maka penelitan membuat kerangka konseptual sebagai berikut.

Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian



Pengaruh *Good Governance* Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Papua

Implementasi dari *good governance* dapat diprioritaskan agar menampilkan aspirasi dari masyarakat untuk mencapai tujuan nasional. Hal ini dapat dijustifikasi bahwa pengelolaan Pemerintah Provinsi Papua yang kurang baik dapat menimbulkan dampak negatif bagi pemerintah dan masyarakat atau pihak lainnya, salah satu contohnya adalah pemerintah akan mengalami kurangnya kepercayaan masyarakat dan akan mempertajam isu-isu krusial yang terjadi pada masyarakat pada Pemerintahan Provinsi Papua. Hal ini didukung oleh hasil kajian (Pratyaksa & Wirawati, 2021) dan Noch et al., (2021) yang mengatakan bahwa *Good governance* berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah. Hasil penelitian diatas bertolak belakang dengan hasil penelitian Hidayat et al., (2021) hasil penelitian yang membuktikan bahwa *good governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pegawai pemerintahan.

H₁ : *Good governance* berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah.

Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Papua

Sistem informasi akuntansi dapat meningkatkan kinerja instansi pemerintah karena system informasi akuntansi sangat dibutuhkan di sektor pemerintahan daerah propinsi papua. Hal ini dapat di justifikasi bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan serta sasaran-sasaran yang akan dicapai sudah mulai menggunakan sistem informasi berbasis komputer terutama dalam



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2022 by author.

pengelolaan keuangan. Disamping itu system informasi akuntansi juga dapat membantu dalam pencapaian kinerja terutama dalam pengelolaan data keuangan sehingga akan terwujudnya transparansi. Pernyataan ini didukung oleh penelitian (Harahap, 2021) dan (Qomariyah, 2021) yang menunjukkan bahwa sitem informasi akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah.

H₂ : Sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah.

Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Papua

Sistem pengendalian intern pemerintah sejalan dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan yang meliputi kerangka pengukuran kinerja, pencapaian sasaran kinerja, kegiatan dan indikator, evaluasi dan analisis sasaran kinerja, analisis efisiesi dan efektivitas serta akuntabilitas keuangan. Dalam SPIP kegiatan pengendalian merupakan bagian dari unsur-unsur SPIP. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi serta sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi suatu instansi pemerintah Provinsi Papua. Hal ini dapat dijustifikasi bahwa untuk memperbaiki kinerja pemerintah perlu diciptakannya sistem pengendalian intern pemerintah agar instansi pemerintah dapat mengetahui dan mempertanggung jawabkan setiap sumber daya daerah yang dikelola oleh setiap masing – masing instansi pemerintah. Pernyataan ini didukung dengan penelitian (Mattoasi et al., 2021) dan (Rahman & Rachman, 2021) yang menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Kinerja Instansi Pemerintah.

H₃ : Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah.

Pengaruh *Good Governance*, Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Papua

Peningkatan kinerja suatu instansi pemerintah dapat dicapai melalui tata kelola keuangan yang di aksanakan dnegan baik. Artinya melalui tata kelola keuangan yang baik dapat memperkuat hubungan antara anggaran dengan hasil yang diharapkan, (Rohman, 2009). Sistem Informasi Akuntansi adalah organisasi formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Pada penyusunannya, sistem informasi akuntansi harus mampu menyediakan informasi yang diperlukan dengan cepat dan tepat waktu serta dapat memenuhi kebutuhan pengguna, sistem informasi akuntansi juga harus dapat membantu menjaga keamanan harta milik perusahaan dan dibuat dengan penekanan biaya sehingga penyusunan sistem relatif tidak mahal. Fungsi sistem pengendalian internal ini adalah untuk mencapai efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Hal ini dapat dijustifikasi bahwa apabila kinerja instansi pemerintah Provinsi Papua dapat berjalan dengan baik jika didukung pula dengan tata pengelolaan keuangan yang baik dan juga diikuti dengan sistem informasi akuntansi serta dilakukan fungsi sistem pengendalian internal maka dapat terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik pula juga pada pemerintahprovinsi Papua. Hal ini sejalan dengan pendapat (Wiwit & Nurqomah, 2021) dan (Pratyaksa & Wirawati, 2021) yang mengatakan bahwa *good governance*, sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintahan.

H₄ : *Good governance*, sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah daerah Provinsi Papua.

Metode Penelitian

Jenis penelian ini adalah explanatory yang berupaya untuk menjelaskan hubungan antara variabel-variabel dan pengaruhnya dengan pengujian hipotesis (Sugiyono, 2013). Rancangan dalam penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini dilakukan menguji jalur empiris dan pengukuran berdasarkan teori yang ada. Model penelitian ini adalah

model survey dengan menggunakan instrument kuesioner. Metode penelitian survey dilakukan untuk mendapatkan data opini individu responden. Penelitian ini menguji pengaruh antara Penerapan *good governance*, sistem informasi akuntansi, dan sistem pengendalian internal terhadap kinerja instansi pemerintah provinsi papua.

Populasi dalam penelitian ini adalah 32 Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Yahokimo Provinsi Papua. Teknik sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu yaitu: Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjabat sebagai kepala didalam OPD, ASN yang menjabat sebagai sub bagian perencanaan, sub bagian keuangan, dan sub bagian umum dan kepegawaian didalam OPD, Minimal telah menduduki jabatan satu tahun sebanyak 97 Responden.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuisioner yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2013) Dengan menggunakan skala *likert* 1 – 5 (sangat setuju, setuju, netral, kurang setuju, tidak setuju).

Variabel yang diteliti dalam kajian ini antara lain; variabel kinerja instansi pemerintah diukur dengan 3 indikator; akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sistem akuntabilitas instansi pemerintah dan laporan akuntabilitas instansi pemerintah. Variabel berikutnya adalah penerapan *good governance* (x1) diukur dengan indikator; kemampuan, akuntabilitas dan transparansi. Semua instrumen yang digunakan untuk mengukur *good governance* diadopsi dari penelitian oleh (Pratyaksa & Wirawati, 2021). Variabel berikutnya sistem informasi akuntansi (X2) diukur dengan indikator; sistem pelayanan, kualitas sistem dan kualitas informasi. Semua instrumen yang digunakan untuk mengukur sistem informasi akuntansi diadopsi dari penelitian oleh (Harahap, 2021). Selanjutnya variabel yang terakhir adalah sistem pengendalian internal (x3) diukur dengan indikator; lingkungan pengendalian, penafsiran resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. Semua instrumen yang digunakan untuk mengukur sistem pengendalian internal diadopsi dari penelitian oleh (Mattoasi et al., 2021).

Pengujian kualitas data dilakukan untuk memenuhi kualitas berupa konsistensi dan akurasi data yang dikumpulkan melalui instrument penelitian. Uji ini perlu dilakukan karena jenis data penelitian adalah data primer, jenis pengujian berupa uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas menggunakan pengujian *construct validity* yang dilakukan dengan teknik korelasi antar skor butir pertanyaan dalam suatu variabel yang diamati dengan skor totalnya, dengan menggunakan rumus korelasi *product moment* dengan level signifikansi 5% dari nilai kritisnya. Uji reliabilitas menggunakan *cronbach's alpha* dari masing-masing instrumen dalam suatu variabel. Sebuah instrumen dikatakan reliabel, jika selalu mendapatkan hasil yang sama dari gejala pengukuran yang tidak berubah yang dilakukan pada waktu yang berbeda-beda (Ghozali, 2013). Menurut (Zainal, 2013) *Reliability* adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan.

Uji asumsi klasik merupakan salah satu syarat maka perlu dilakukan pengujian hipotesis yang bertujuan untuk menguji persamaan regresi linear agar dapat dikatakan sebagai model yang baik. Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, multikolinieritas, dan heteroskedastisitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji kenormalan distribusi variabel dependen dan variabel independen. Uji normalitas data pada penelitian dilakukan dengan menggunakan grafik normal *probability plot* dengan melihat kecenderungan sebaran data terhadap garis regresi (Santoso, 2015). Dalam penelitian ini teknik untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas didalam model regresi dapat dilihat dari nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF), nilai *tolerance* yang besarnya diatas 0,1 dan nilai VIF dibawah 10 menunjukkan bahwa tidak ada multikolinearitas diantara variabel bebasnya (Ghozali, 2013). Menurut (Priyatno, 2018) menyatakan bahwa model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heteroskedastisitas.



pengujian heteroskedastisitas dalam kajian ini adalah dengan melihat penyebaran titik-titik pada grafik *scatterplot* yang kriterianya yaitu;

1. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka terjadi heterokedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastistas.

Hasil dan Pembahasa Penelitian

Uji Instrumen Penelitian

Uji Validitas

Uji validitas menunjukkan sejauh mana tingkat efektivitas alat pengukur dalam melakukan pengukuran Agusty, (2014). Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan rumus *korelasi Product Moment Person*, dimana valid atau tidaknya instrumen dapat diketahui dengan membandingkan indeks korelasi *Product Moment Person* dengan signifikan 5%. Artinya bila probabilitas hasil korelasi lebih kecil dari 0.05 maka instrumen dinyatakan tidak valid dan sebaliknya, jika hasil korelasi lebih besar dari 0.05 maka instrumen dinyatakan valid. Hasil pengujian validitas dimaksud dapat di lihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

No.	Variabel	Indikator	Korelasi Product Moment		
			r	Sig	Keterangan
1.	Kinerja Instansi Pemerintah	Y1.1	0,813	0,000	Valid
		Y1.2	0,813	0,000	Valid
		Y1.3	0,753	0,000	Valid
2.	Penerapan <i>Good Governance</i>	X1.2	0,773	0,000	Valid
		X1.3	0,830	0,000	Valid
		X1.4	0,825	0,000	Valid
3.	Sistem Informasi Akuntansi	X2.1	0,830	0,000	Valid
		X2.1	0,818	0,000	Valid
		X2.3	0,829	0,000	Valid
4.	Sistem Pengendalian Internal	X3.1	0,739	0,000	Valid
		X3.2	0,649	0,000	Valid
		X3.3	0,724	0,000	Valid
		X3.4	0,703	0,000	Valid
		X3.5	0,701	0,000	Valid

Sumber; Data primer yang diolah, (2022).

Data diatas menunjukkan bahwa *nilai koefisien product moment (r)* lebih besar dari 0.5 serta nilai sig 0,000 yang berarti keseluruhan item pernyataan adalah valid untuk pengujian selanjutnya.

Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan rumus *Cronbach's Alpha*. Suatu variabel dikatakan reliabel dan konsisten jika nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari nilai kritisnya yaitu 0,6 Ghozali (2018). Hasil dari pengujian reliabilitas setiap variabel dalam penelitian ini disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

No.	Variabel	Indikator	<i>Cronbach's Alpha</i>	Nilai Kritis	Keterangan
1.	Kinerja Instansi Pemerintah	Y1.1	0,718	0,60	Reliabel
		Y1.2			
		Y1.3			
2.	Penerapan <i>Good Governance</i>	X1.1	0,736	0,60	Reliabel
		X1.2			
		X1.3			
3.	Sistem Informasi Akuntansi	X2.1	0,765	0,60	Reliabel
		X2.2			
		X2.3			
4.	Sistem Pengendalian Internal	X3.1	0,744	0,60	Reliabel
		X3.2			
		X3.3			
		X3.4			
		X3.5			

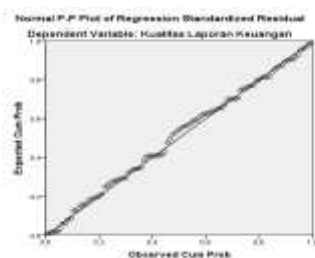
Sumber; Data primer yang diolah, (2022).

Berdasarkan tabel uji reliabilitas diatas, menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60 pada semua variabel. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semua konsep pengukuran masing-masing variabel dari kuesioner adalah reliabel yang artinya semua data pada penelitian ini memenuhi syarat dan konsisten.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Pengujian normal tidaknya distribusi data penelitian ini dilakukan dengan melihat penyebaran data pada *normal probability plot*. Tampilan hasil pengujian *normal probability plot* data penelitian ini terlihat dibawah ini.

Gambar 2. Hasil Uji Normal Probability Plot

Sumber; Olah data menggunakan SPSS 22, (2022).



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2022 by author.

Berdasarkan normal *probability plot* gambar diatas maka data penelitian ini dapat dikatakan telah memenuhi kaidah normalitas karena terlihat bahwa data penyebar mengikuti garis diagonal, penyebarannya secara acak dan tidak membentuk pola tertentu.

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

<i>One-Sampel Kolmogorov-Smirnov Test</i>		
		<i>Unstandardized Residual</i>
N		97
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std.Deviation	1,29309836
Most Extreme Differences	absolute	0,050
	positive	0,32
	Negative	-0,50
Test Statistic		0,050
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		0,200 ^{c,d}

Sumber; Hasil olah data primer, (2022).

Berdasarkan informasi diatas dapat dilihat bahwa nilai Asymp. Sig (2-tailed) lebih besar dari 0,05 yaitu 0,200 ,sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diuji terdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinearitas dalam model regresi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan melihat nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Hasil dari Uji Multikolinearitas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Penerapan <i>Good Governance</i>	.390	2.561
Sistem Informasi Akuntansi	.353	2.831
Sistem Pengendalian Internal	.392	2.549

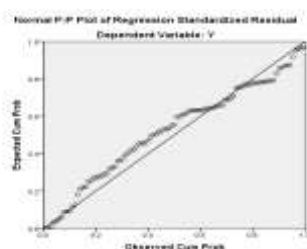
Sumber; Hasil olah data primer, (2022).

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa nilai dari *tolerance* pada variabel independen $> 0,1$ dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10 . Dengan demikian, dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh model regresi dalam penelitian ini tidak ada terjadi multikolinearitas dan data layak untuk digunakan.

Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat gambar *charts scatterplot*. Berikut ini adalah hasil pengujian heteroskedastisitas yang terlihat pada gambar *charts scatterplot* dibawah ini.

Gambar 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas



Gambar diatas menunjukkan bahwa data penelitian bebas heteroskedastisitas karena titik-titik data penyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh Penerapan *Good Governance* Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Yahokimo

Secara statistik, hasil analisis data penelitian menunjukkan bahwa penerapan *good governance* berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Yahokimo. Hasil ini didukung oleh hasil analisis deskriptif yang mengungkapkan bahwa nilai rata-rata persepsi responden tentang penerapan *good governance* adalah sebesar 4,15 yang berarti bahwa untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah dituntut untuk meningkatkan penerapan *good governance* dilindungi OPD Pemerintah Kabupaten Yahokimo.

Hasil pengujian mengungkapkan bahwa penerapan *good governance* nilai t_{hitung} sebesar 2,352 yang lebih besar dari t_{tabel} yaitu 1,661 ($2,352 > 1,661$) yang berarti bahwa terima H_a dan tolak H_0 artinya apabila pelaksanaan *good governance* pada pemerintah daerah kabupaten Yahokimo dilaksanakan dengan baik, maka kinerja pemerintah juga akan semakin baik.

Hasil yang diperoleh dalam pengujian hipotesis pertama mendukung hasil penelitian Rahman & Rachman, (2021) yang mengatakan bahwa penerapan *good governance* berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintahan. Namun penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Hidayat et al., (2021) yang mengatakan bahwa *good governance* tidak berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintahan.

Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Yahokimo

Berdasarkan hasil uji t regresi linear di ketahui bahwa variabel sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Yahokimo. sistem informasi akuntansi menawarkan kemudahan dan efisiensi waktu, namun dibutuhkan kapabilitas aparat dalam memanfaatkan atau pemahaman dalam menggunakan sistem tersebut.

Hasil pengujian hipotesis kedua mengungkapkan bahwa sistem informasi akuntansi memiliki nilai t_{hitung} sebesar 1,786. sementara nilai $t_{tabel} = 1,661$. Sehingga $t_{hitung} > t_{tabel} = (1,786 > 1,660)$ yang berarti bahwa H_0 di tolak dan H_a yang menunjukkan bahwa dengan adanya sistem informasi akuntansi akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Setiap organisasi dituntut untuk selalu meningkatkan kinerjanya. Hal ini mendorong pemerintah untuk menerapkan sistem informasi akuntansi dalam melaksanakan rutinitas tugas pemerintah agar mempermudah, mempercepat, dan meminimalisir tingkat ketidak akuratan data. Hasil yang diperoleh dalam pengujian hipotesis kedua mendukung hasil penelitian Harahap, (2021) yang mengatakan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintahan.

Sistem Pengendalian Internal berpengaruh Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Yahokimo.

Berdasarkan hasil uji t regresi linear di ketahui bahwa variabel sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Yahokimo. Artinya semakin baik dan efektif pengendalian intern yang dilaksanakan maka kinerja pemerintah juga akan semakin baik.

Hasil pengujian mengungkapkan bahwa sistem pengendalian internal memiliki nilai t_{hitung} sebesar 4,304. Sementara nilai $t_{tabel} = 1,661$. Sehingga $t_{hitung} > t_{tabel} (4,304 > 1,661)$ yang berarti bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak artinya sistem pengendalian internal pemerintah yang



diterapkan pada setiap instansi pemerintah yang ada di Pemerintah Kabupaten Yahokimo maka akan meningkatkan kinerja dari instansi itu sendiri. Dengan adanya sistem pengendalian internal pemerintah diharapkan agar tujuan dari masing-masing instansi seperti kegiatan yang efektif dan efisien, laporan keuangan yang dapat diandalkan, pengamanan aset daerah, serta ketaatan terhadap peraturan perundangan-undangan dapat tercapai. Oleh karena itu dari kelima komponen sistem pengendalian internal pemerintah yang ada, penilaian resiko merupakan komponen yang paling penting. Karena penilaian resiko merupakan kegiatan untuk menilai atas kemungkinan terjadinya kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Oleh karena itu diperlukan aparatur yang kompeten dan jeli dalam melakukan identifikasi dan analisis risiko dari tujuan suatu instansi.

Hasil yang diperoleh dalam pengujian hipotesis kedua mendukung hasil penelitian Pratyaksa & Wirawati, (2021) yang mengatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. Namun hasil penelitian diatas bertolak belakang dengan hasil penelitian Hidayat et al., (2021) yang mengatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah.

Pengaruh Penerapan *Good Governance*, Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Yahokimo

Secara keseluruhan hasil analisis menunjukkan bahwa model konseptual yang dibangun telah mampu menjelaskan kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Yahokimo dilihat dari penerapan *good governance*, sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian internal. Secara detailnya, hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan *good governance*, sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian internal yang memiliki t_{hitung} sebesar = 51,556 yang lebih besar dari nilai F_{tabel} yaitu sebesar = 2,31 ($51,556 > 2,31$) yang berarti bahwa terima H_a dan tolak H_0 artinya bahwa penerapan *good governance*, sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian internal secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Yahokimo.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait pengaruh penerapan *good governance*, sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian internal terhadap kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Yahokimo, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Penerapan *good governance* berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Yahokimo.
2. Sistem informasi akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Yahokimo.
3. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Yahokimo.
4. Penerapan *good governance*, sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian internal secara simultan berpengaruh terhadap kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Yahokimo.

Saran

Beberapa saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Bagi instansi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Yahokimo agar selalu memaksimalkan kinerja instansi pemerintah dengan memperhatikan faktor Penerapan *good governance*, sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian internal.
2. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dan tambahan ilmu terkait faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja instansi pemerintah daerah.
3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan dapat menambahkan variabel bebas lainnya yang dapat mempengaruhi Kinerja Instansi Pemerintah, serta pemilihan objek penelitian yang berbeda

selain dari OPD Kabupaten Yahokimo dan lebih luas agar memperoleh hasil penelitian yang lebih baik lagi.

Daftar Pustaka

- Agusty, F. (2014). *Metode Penelitian Manajemen*. BP Universitas Diponegoro. Semarang.
- Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2012). Auditing and Assurance Service: An Intergreted Approach, 13th Edition, New Jersey: Pearson, Prentice Hall Inc. *Auditing and Assurance Service: An Intergreted Approach, 13th Edition, New Jersey: Pearson, Prentice Hall Inc.*
- Eduard Yohannis Tamaela, Victor Pattiasina, Margaretha B. Dasinapa, Yohanes Marani, J. A. D. (2020). Regional Financial Monitoring Models With Community Participation And Public Policy Transparency As Moderators. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(02), 4223–4232. <https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I2/PR200745>
- Ghozali, I. (2013). *Analisa Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semaran.
- Harahap, R. U. (2021). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Karyawan. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 38–51. <https://doi.org/10.47221/tangible.v4i1.52>
- Hidayat, T., Mustika, A., & Murialti, N. (2021). Pengaruh Good Governance, Kompetensi, Dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kampar. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi, Bisnis & Akuntansi*, 1, 87–97.
- Krismiaji. (2010). Sistem Informasi Akuntansi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. *Sistem Informasi Akuntansi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.*
- Mattoasi, M., Musue, D. P., & Rauf, Y. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jambura Accounting Review*, 2(2), 100–109. <https://doi.org/10.37905/jar.v2i2.34>
- Noch, M. Y., Bonsapia, M., Patiran, A., A.Tuhumury, H., & Pattiasina, V. (2021). Determinan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. *Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis*.
- Peraturan Pemerintah. (1999). Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah. *Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah*.
- Peraturan Pemerintah. (2004a). Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. *Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*.
- Peraturan Pemerintah. (2004b). Peraturan Pemerintah No 33 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. *Peraturan Pemerintah No 33 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*.
- Peraturan Pemerintah. (2008a). Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah. *Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah*.
- Peraturan Pemerintah. (2008b). *Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 Tentang sistem pengendalian internal internal*.



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2022 by author.

- Pratyaksa, P. Y. A., & Wirawati, N. G. P. (2021). Good Government Governance, Pengendalian Intern, Komitmen Organisasi, Gaya Kepemimpinan dan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(3), 746. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i03.p17>
- Priyatno. (2018). *SPSS Panduan Mudah Olah Data Bagi Mahasiswa & Umum*. Yogyakarta: Andi.
- Qomariyah, S. (2021). Kinerja karyawan dpupr kabupaten sragen. *Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Surakarta*, 1(1).
- Rahman, K. G., & Rachman, S. H. (2021). Pengaruh Penerapan Good Governance dan Pengendalian Internal terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah di Kota Makassar. *Equilibrium*, 2(1), 25–31.
- Rohman. (2009). Pengaruh Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah dan Fungsi Pemerintah Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Maksi*, 7(ISSN: 1412-6680).
- Ruspina, D. O. (2013). *Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Penerapan GoodGovernance (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kota Padang)*. *Jurnal Universitas Negeri Padang*. 1(3): 20- 24.
- Santoso, S. (2015). *SPSS20 Pengolahan Data Statistik di Era Informasi, Jakarta, PT. Alex Media Komputindo, Kelompok Gramedia*.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suprayogi, A. (2010). pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Suatu Studi Padad Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung), Skripsi.Universitas Pasundan. Bandung. *Universitas Pasundan Bandung*.
- Surijadi, H., & Tamaela, E. Y. (2018). THE EFFECT OF ACCOUNTABILITY, TRANSPARENCY, OPENNESS, FAIRNESS AND COMPETITION ON EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY OF E-PROCUREMENT IN MALUKU PROVINCIAL PROCUREMENT SERVICES UNIT. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 79(7), 113–122. <https://doi.org/10.18551/rjoas.2018-07.12>
- Victorio Fernando Nahuway & Eduard Yohannis Tamaela. (2020). Model Efektifitas dan Efisiensi E-Procurement serta Dampaknya Terhadap Kepuasan Pengguna di Provinsi Maluku. *JURNAL MANEKSI*, 9(1), 275–282. Retrieved from <http://ejournal-polnam.ac.id/index.php/JurnalManeksi/article/view/327/351>
- Wiwit, & Nurqomah. (2021). PENGARUH SISTEM AKUNTANSI, PENGAWASAN INTERNAL, DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH (Studi pada Badan Keuangan Daerah KabupatenBoyalali). *Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*.
- Wulandari, N. E. (2011). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Pada Kinerja Aparat Pemerintah Daerah: Kepuasan Kerja dan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel

Pemoderasi. Thesis Undergraduate. Universitas Diponegoro. *Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Pada Kinerja Aparat Pemerintah Daerah: Kepuasan Kerja Dan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Pemoderasi. Thesis Undergraduate. Universitas Diponegoro.*

Zainal, R. (2013). Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi: studi empiris Kantor Cabang Bank Pemerintah dan Swasta di Kota Padang. *Jurnal Akuntansi. Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal Dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi: Studi Empiris Kantor Cabang Bank Pemerintah Dan Swasta Di Kota Padang. Jurnal Akuntansi.*



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2022 by author.